

**STUDI PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS BEDAH
ONKOLOGI DILANDASI CITA HUKUM
KEADILAN, MANFAAT DAN KEPASTIAN HUKUM
(SEBUAH KAJIAN YURIDIS-NORMATIF)**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh:
EKA YUDHANTO
NIM 22.C2.0094

Kepada
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2024

TESIS

**STUDI PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS BEDAH
ONKOLOGI DILANDASI CITA HUKUM Keadilan, Manfaat dan Kepastian Hukum
(SEBUAH KAJIAN YURIDIS-NORMATIF)**

ABSTRAK

Negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan juga kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu cara untuk mengembangkan dan menginvestasikan sumber daya manusia kesehatan yang merupakan modal mencapai kesejahteraan dan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dilakukan dengan melaksanakan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk, menganalisis landasan hukum, kepastian hukum, dan mengkaji prinsip keadilan dan manfaat yang dapat dipertimbangkan dalam pembentukan program studi baru yakni Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Bedah di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-kualitatif yang dilakukan dengan cara menginventarisasi hukum positif dalam melihat peluang pembentukan program studi baru di rumpun Ilmu Bedah. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan Studi Kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan yuridis pembentukan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Onkologi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 93/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis; dan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor: 01/PP/01.2023. Prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum harus dipertimbangkan dalam Pembentukan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Onkologi di Indonesia yang mengingat minimnya jumlah Dokter Spesialis Bedah Onkologi di Indonesia dan terkait dengan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Saran atau rekomendasi Penelitian adalah agar Pemerintah dengan sungguh-sungguh dapat mempertimbangkan untuk diberikannya izin bagi Pembentukan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Onkologi apabila semua syarat untuk pembentukan dan pendirian telah sesuai dengan undang-undang.

Kata Kunci: Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Onkologi, Keadilan, Manfaat, Kepastian Hukum

ABSTRACT

The state ensures the right of every citizen to access education and healthcare as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One method to cultivate and invest in human health resources, which are essential for attaining optimal welfare and health, is through the implementation of education. This study seeks to evaluate the legal foundation, legal certainty, and assess the principles of justice and benefits pertinent to the development of a new academic program, specifically the Surgical Oncology Specialist Study Program in Indonesia.

This research is a normative-qualitative legal study that inventories positive law to assess the feasibility of establishing a new program in surgical oncology. The research utilizes secondary data, which includes primary legal resources, secondary legal materials, and tertiary legal materials. A literature review facilitated the collection of the research data. The employed data analysis technique is qualitative analysis.

The study's findings indicate that the legal foundation for the establishment of the Surgical Oncology Specialist Education Study Program in Indonesia is based on Law Number 20 of 2003 regarding the National Education System; Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education; Law Number 17 of 2023 pertaining to Health; Government Regulation Number 28 of 2024 related to the Implementing Regulations of Law Number 17 of 2023 concerning Health; Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia Number 36 of 2021 regarding the Faculty of Medicine and the Faculty of Dentistry; Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia Number 53 Year 2023; Decree of the Director General of Higher Education of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 93/E/KPT/2020 outlining Requirements and Procedures for Opening Study Programs in Specialist Doctor Education; and Regulation of the Management of the LAM-PTKes Association Number: 01/PP/01.2023. Given the limited number of Oncology Surgery Specialists in the country and the necessity of health services for the community, the establishment of the Oncology Surgery Specialist Study Program in Indonesia must be considered by the government in terms of the principles of justice, benefit, and legal certainty.

According to the research, the government should seriously consider approving the development of the Oncology Surgery Specialist Study Program, provided that all legal requirements are satisfied.

Keywords: *Oncology Surgery Specialist Study Program, Justice, Benefits, Legal Certainty*

